

Research Article

Moral And Ethics in a Government Perspective

Muhammad Fajar Sidik

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail : muhammadfajars0912@gmail.com

Wulan Kurniasih

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail : wulankurniasihxx@gmail.com

Ibnu Rusydi

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail : ibnurs@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by Diplomasi : Jurnal Politik, Demokrasi dan Pemerintahan.

Received : 10 Februari 2024

Revised : 31 Maret 2024

Accepted : 27 April 2023

Available online : 30 April 2024

How to Cite: Muhammad Fajar Sidik, Wulan Kurniasih, & Ibnu Rusydi. (2024). Moral And Ethics in a Government Perspective. *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 39–47. <https://doi.org/10.58355/dpl.v2i2.21>

Abstract. The research carried out by the writing team aims to improve the quality of morals, ethics and morals, especially in the government environment. The research method we use is a mixed research method, namely field interviews and using sources from books. The conclusion from our research results is the importance of implementing good morals, ethics and morals in the government environment, to create the best possible service to the community. And this research contains important matters relating to morals, ethics and morals in the government environment.

Keywords: Morals, Ethics, Government.

Abstrak : Penelitian yang dilakukan oleh tim penulis bertujuan untuk meningkatkan mutu moral, etika, dan akhlak khususnya dilingkungan pemerintahan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian campuran (mixed method) yaitu dengan wawancara lapangan dan menggunakan sumber-sumber dari buku. Kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah pentingnya penerapan moral, etika, dan akhlak yang baik di lingkungan pemerintahan, untuk menciptakan

Moral And Ethics in a Government Perspective

Muhammad Fajar Sidik, Wulan Kurniasih, Ibnu Rusydi

pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dan pada penelitian ini dimuat tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan moral, etika, dan akhlak di lingkungan pemerintahan.

Kata Kunci : Moral, Etika, Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Perubahan pada etika, moral, dan akhlak di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, telah terjadi sebagai akibat kemajuan zaman dan globalisasi. Hal ini bisa dilihat melalui beberapa masalah yang ada, seperti penyalahgunaan obat terlarang, kekerasan yang dilakukan oleh remaja, dan kejadian hamil pada remaja perempuan. Etika, moralitas, dan tingkah laku berperan krusial dalam menentukan nilai positif dan negatif perilaku individu. Etika memiliki asal usul yang mengacu pada sifat-sifat atau kebiasaan yang baik, sedangkan moral merujuk pada minat spiritual terhadap norma-norma yang telah ditetapkan oleh agama, budaya, atau pemikiran ilmiah.

Menurut Mustafa, secara konsep etika adalah cabang pengetahuan yang mempelajari tindakan manusia dan nilai-nilai moral dengan mempertimbangkan akal budi dan pemikiran manusia. Diungkapkan oleh Russel Swanburg, moral diartikan sebagai ungkapan pemikiran dan konsep yang mempengaruhi motivasi dan tingkah laku seseorang dalam lingkungan kerja. Menurut Al-Mawardi, etika dan moral secara hierarki berada di bawah akhlak, yang juga berkaitan erat dengan ilmu-ilmu lain seperti fiqih dan tasawuf.

Pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pengaruh terhadap etika, moral, dan akhlak di dalam masyarakat tidak bisa diremehkan. Dalam konteks pemerintahan, prinsip-prinsip etika, moral, dan akhlak menjadi fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. Karena itu, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan regulasi mengenai prinsip-prinsip moral dan etika, serta memberikan pengaruh terhadap pengembangan standar perilaku di masyarakat. Idea ini juga terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter dan pembinaan moral bagi pegawai negeri.

Etika politik melibatkan prinsip-prinsip pokok yang perlu diterapkan dalam tindakan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Penting bagi pemerintah untuk menjalankan peran aktif dalam memajukan nilai-nilai etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga kontinuitas peradaban, masyarakat, dan negara, hal ini menjadi hal yang sangat penting.

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang prinsip etika, moral, dan akhlak dalam sudut pandang pemerintahan dapat memberikan

wawasan mengenai bagaimana pemerintah mampu mempengaruhi dan membentuk sistem nilai dalam masyarakat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa tugas pemerintah adalah untuk mengampanyekan nilai-nilai etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari serta memelihara keberlangsungan masyarakat secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran, dimana terdapat metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dalam hal ini sumber literatur yang digunakan adalah buku-buku yang terkait dengan materi penelitian kami. Dan metode kuantitatif dimana kami turun lapangan langsung untuk melakukan wawancara dengan tokoh yang berada di lingkungan pemerintahan, dalam hal ini kami mewawancarai Bapak Dr. Pendi Susanto, M, Pd. Selaku kasi pemerintahan di lingkungan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Etika dan Akhlak dalam Perspektif Pemerintahan

Etika dan moral dalam konteks pemerintahan adalah penting karena memiliki dampak langsung pada integritas, tanggung jawab, dan perilaku pemerintah. Penguatan etika dan akhlak di kalangan pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Dengan demikian, pemerintah perlu menjadikan etika dan akhlak sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut sudut pandang pemerintahan, etika merupakan disiplin yang terkait dengan perilaku yang positif atau negatif, hak, tanggung jawab moral, serta prinsip-prinsip yang terkait dengan moralitas. Etika pemerintahan meliputi prinsip-prinsip seperti moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, etika dalam memimpin pemerintahan, dan moralitas bagi para pegawai dalam melayani publik. Dalam konteks pemerintahan, etika memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk tindakan dan prinsip-prinsip yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaan moral dalam pemerintahan, terdapat pengungkapan prinsip-prinsip baik dalam tata kelola pemerintahan, yang mencakup tata kelola birokrasi dan organisasi pemerintah, serta aturan moral dalam kegiatan sehari-hari. (Ismail. 2017. Etika Pemerintahan).

B. Macam Etika

1. Etika kepemimpinan memiliki peran yang signifikan dalam kualitas moral dan akhlak dalam konteks pemerintahan. Seorang kepala yang mempraktikkan sikap moral yang positif mampu melaksanakan pekerjaannya secara efektif serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
2. Etika Pelayanan Publik adalah aspek yang sangat krusial dalam hal moral, etika, dan perilaku yang diterapkan dalam konteks pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penguatan legitimasi pemerintah dapat dicapai melalui pemberian layanan publik yang berkualitas dan berintegritas.
3. Etika dan integritas juga memainkan peran yang penting dalam menjaga moral, prinsip-nilai, dan perilaku yang baik dalam pemerintahan. Seorang pemimpin yang memiliki moral dan prinsip yang kuat akan lebih efektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memberikan pelayanan yang superior kepada masyarakat. (Putri,K.,& Dkk.2021).

C. Faktor-faktor penting terkait moral, etika, dan akhlak harus diperhatikan

1. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah

Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan moral, etika, dan akhlak dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Kebijakan yang memberikan dukungan terhadap pengembangan karakter melalui pendidikan, pembinaan etika bagi aparatur sipil negara, dan penegakan nilai-nilai etika dalam memberikan pelayanan publik dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi pemerintah dalam mengedepankan nilai-nilai tersebut. Implementasi nilai-nilai etika dalam pemerintahan dan masyarakat dapat dibentuk melalui adopsi kebijakan yang transparan dan terukur.

2. Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang terarah dalam mengajarkan nilai-nilai karakter khusus kepada para siswa. Dengan menggunakan pendidikan karakter, generasi muda dapat dibekali dengan nilai-nilai etika, moral, dan akhlak sejak usia dini. Pelaksanaan pendidikan karakter yang positif bisa berkontribusi dalam membentuk norma-nilai dalam masyarakat dan menghasilkan generasi yang memiliki tingkat kesadaran moral, etika, dan akhlak yang tinggi.

3. Pengembangan Nilai-nilai Etika bagi Aparatur Sipil Negara

Membangun nilai-nilai etika bagi pegawai negeri sangat penting agar pelayanan publik dapat dijalankan dengan efektif dan memiliki integritas

yang tinggi. Dengan melaksanakan pelatihan etika bagi pegawai pemerintah, pemerintah dapat memeriksa apakah para pegawai negeri memiliki integritas, moralitas, dan etika yang positif saat melaksanakan tugasnya. Dampaknya dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa moral, etika, dan akhlak dalam pemerintahan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, implementasi pendidikan karakter, dan pengembangan nilai-nilai etika untuk pegawai negeri. Melaksanakan dengan baik faktor-faktor ini dapat berkontribusi dalam membentuk norma-nilai dalam masyarakat serta mengamankan kepemimpinan yang efektif. (Suwartini, S.2017).

D. Cara Moral, Etika, Dan Akhlak Mempengaruhi Pemerintahan

1. Upaya untuk menjaga transparansi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan dengan menerapkan etika, moral, dan akhlak yang baik. Penegakan prinsip-prinsip etika dan moral oleh pemerintah akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya serta memberikan layanan yang unggul kepada masyarakat.
2. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengedepankan nilai-nilai etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya membangun tata nilai dalam masyarakat. Penting bagi kita untuk mempertahankan kelangsungan peradaban, keberadaan bangsa, dan negara.
3. Aparatur yang memiliki integritas dan prinsip moral yang tinggi akan lebih efektif dalam melakukan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat.

Moral, etika, dan perilaku yang baik memiliki pengaruh yang penting dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah dapat membentuk nilai-nilai yang teratur dalam masyarakat dan menjaga pelaksanaan pemerintahan yang adil dan terbuka, dengan memahami secara mendalam konsep-konsep tersebut. Moral, etika, dan akhlak dalam sudut pandang pemerintahan bertujuan untuk mengerti bagaimana pemerintah mampu memberikan pengaruh dan membentuk standar moral dalam masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat nilai-nilai tersebut dan memastikan berlangsungnya kehidupan masyarakat dengan baik, dengan memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep yang ada. Adapun juga dapat berperan penting dalam menjalankan pemerintahan dengan efektif. Maka, pemerintah dapat menggunakan penelitian dan pemahaman yang komprehensif tentang konsep-

konsep tersebut untuk mempengaruhi dan membentuk sistem nilai di dalam masyarakat.

Moral, etika, dan perilaku yang baik memiliki pengaruh yang penting dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah dapat membentuk nilai-nilai yang teratur dalam masyarakat dan menjaga pelaksanaan pemerintahan yang adil dan terbuka, dengan memahami secara mendalam konsep-konsep tersebut.

Mendirikan landasan moral adalah kunci yang penting dalam menjalankan aspek pemerintahan. Apabila kebijakan pemerintah didasarkan pada aspek etika, maka hasilnya akan mengakibatkan manfaat yang sejalan dengan moral dan peraturan. Etika mengacu pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pandangan suatu negara dan kemajuan negara itu sendiri. Moralitas juga terkait dengan dimensi religiusitas, di mana segala agama percaya bahwa ada standar yang serupa untuk kebaikan.

Sebagai akibatnya, bila pemerintah didirikan berdasarkan moralitas, prinsip-prinsip filsafat nasional dan agama akan tetap menjadi landasannya. Menjaga kesejahteraan negara, masyarakat, dan individu memiliki peranan yang sangat penting. Walaupun tugas pemerintahannya tidak lagi terfokus pada nilai moral dan agama, namun nilai-nilai tersebut sejatinya masih memegang peranan yang signifikan. Jika kita menghapus hal tersebut, maka negeri ini akan berubah menjadi seperti apa? Sebagai pemerintah, kepentingan moral dan kewajiban untuk bertanggung jawab sangatlah penting. Karena alasan ini, penting untuk menerapkan prinsip moralitas agama dalam pemerintahan.

Bukti atas hal ini dapat ditemukan di Korea, di mana seorang perdana menteri dan saudaranya terjerat dalam korupsi dan praktik nepotisme. Kakaknya bahkan mengakhiri hidupnya karena merasa tersisihkan oleh rasa malu atas perbuatannya. Rasa keprihatinan terhadap moralitas dan kuatnya budaya untuk merasa malu mendorong mereka untuk merasa accountable atas tindakan mereka. Karena alasan tersebut, penting bagi kita untuk selalu memelihara prinsip moral dan etika dalam pengelolaan pemerintahan agar dapat menjaga kesejahteraan negara dan masyarakat. (Wawancara dengan Dr. Pendi Susanto, M,Pd. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu).

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, dapat disarikan bahwa moral, etika, dan akhlak memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan dengan tujuan membentuk nilai-nilai yang baik dalam masyarakat dan memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif. Meskipun secara makna, perluasan, dan tujuan mereka serupa, ada

perbedaan pokok di antara ketiga konsep tersebut. Moralitas mengedukasi tentang aspek kebenaran, sementara etika melibatkan pelaksanaan tindakan yang benar.

Sementara itu, akhlak membahas pemahaman terkait kebaikan dan kejahatan dalam berbagai situasi, termasuk dalam hal pemerintahan. Agar masyarakat memiliki tata nilai yang baik dan pemerintahan yang efisien, faktor-faktor utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah, pendidikan karakter, serta peningkatan nilai etika pada aparatur sipil negara. Di samping itu, ada faktor lain yang bisa berdampak pada pelaksanaan pemerintahan, seperti pertanggungjawaban, kejujuran dan kemampuan profesional, serta prinsip moral, perilaku, dan tata krama.

Menerapkan faktor dan aspek ini dengan baik dapat berkontribusi untuk membangun sistem nilai dalam masyarakat dan memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif. Keuntungan yang timbul dari penerapan yang efektif dari aspek-aspek ini adalah pertumbuhan ekonomi serta perkembangan individu, akses yang lebih terbuka terhadap informasi, pemulihan ekonomi, transparansi, dan peningkatan layanan masyarakat.

Maka, untuk pemerintah, menjaga kemajuan masyarakat secara keseluruhan dan mendorong nilai-nilai moral, etika, dan akhlak memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dalam perspektif pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Rahman Nasution. (2023). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Peserta Didik Di SMP Negeri 2 Sibolangit. *Manajia: Journal of Education and Management*, 1(2), 77–86. <https://doi.org/10.58355/manajia.v1i2.12>
- Devi Yusnila Sinaga. (2023). Strategi Guru PAI dalam Membentuk Karakter Islami Siswa Di SMP Negeri 2 Sibolangit. *Manajia: Journal of Education and Management*, 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.58355/manajia.v1i2.14>
- Didik Himmawan, Khuzaimah, & Evi Aeni Rufaedah. (2024). Konsep Adab Menuntut Ilmu Perspektif Muhammad Syakir Dalam Kitab Washoya Dan Relevansinya Dengan Etika Pendidikan Modern. *Journal Islamic Pedagogia*, 4(1), 82–91. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v4i1.113>
- Didik Himmawan, Sigit Hendriawan, & Wanji Julianto. (2022). Sosialisasi E-Ktp Dan Pemilihan Pemula Di Desa Kedokan Gabus Kabupaten Indramayu. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 31–35. <https://doi.org/10.58355/engagement.v1i1.3>
- Habibah, S. (2015). Akhlak Dan Etika Dalam Islam. *Jurnal Pesona Dasar*.

Moral And Ethics in a Government Perspective

Muhammad Fajar Sidik, Wulan Kurniasih, Ibnu Rusydi

- Hafid, A., Pikhulan, R. M., & Hasim, H. (2020). Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam : Moralitas Politik Pancasila. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Iko Rizqonah, Ibnudin, & Ahmad Syathori. (2023). Increasing Prayer Ability for Children in Cibeber Village, Sukagumiwang District, Indramayu Regency. *Quality : Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies*, 1(2), 70–76. <https://doi.org/10.58355/qwt.v1i2.15>
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Labolo, M. (2016). *Modul Etika Pemerintahan*. Indonesia: Ipdn.
- Linawati, Y., & Dkk. (2021). Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang Oki. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*.
- Putri, K., & Dkk. (2021). Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Ramadhan, S. ., Himmawan, D. ., & Rusydi, I. . (2023). Konsep Etika Belajar Menurut Syeikh Az-Zarnuji (Studi Analisis Kitab Ta’lim Muta’allim). *Journal Islamic Pedagogia*, 3(2), 107–114. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v3i2.92>
- Siti Aisyah, Ahmad Khotibul Umam, & Ibnu Rusydi. (2024). Empowering The Young Generation Through Hadroh Training At The Baitul Muminin Mosque, Gebang Village, Gebang District, Cirebon Regency. *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.58355/dpl.v2i1.16>
- Suhayib. (2016). *Studi Akhlak*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Suwartini, S. (2017). Pendidikan Karakter Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Keberlanjutan. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-Sd-An*.
- Tita Rizqiyah, & Didik Himmawan. (2024). Community Empowerment Through Family Counseling Concerning Current Parenting Patterns in Pangkalan Losarang Village, Indramayu. *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.58355/dpl.v2i1.12>
- Wilda Deliana Harahap, Herman Nirwana, & Neviyarni S. (2024). Building Motivation In Learning For Academic Success. *Journal Of Psychology, Counseling And Education*, 2(1), 22–30. <https://doi.org/10.58355/psy.v2i1.16>

Moral And Ethics in a Government Perspective

Muhammad Fajar Sidik, Wulan Kurniasih, Ibnu Rusydi

Wildan Saleh Siregar. (2023). Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 2 Sibolangit. *Manajia: Journal of Education and Management*, 1(2), 87–94. <https://doi.org/10.58355/manajia.v1i2.13>

Yunus, N. R. (2014). Etika Dan Moralitas Politik Anggota Dewan. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Fai Uika Bogor*.